

Buku ini mengupas secara mendalam bagaimana masjid dapat kembali mengemban perannya sebagai jantung peradaban umat Islam bukan sekadar tempat ibadah, melainkan pusat pemberdayaan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Ditulis oleh Dr. Muhammad Nizar, M.E.I dan Windari, dengan studi lapangan di Masjid Moekhlas Sidik atau “Masjid Merah” di Pasuruan, buku ini menawarkan refleksi kritis sekaligus solusi praktis dalam membangun masyarakat yang mandiri dan berkeadilan.

Fokus utama buku:

- 1.Keterlibatan Masyarakat dalam Pemberdayaan
- 2.Landasan Teori Pemberdayaan Masyarakat
- 3.Masjid Sebagai Pusat Pemberdayaan
- 4.Bentuk dan Program Pemberdayaan Berbasis Masjid
- 5.Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid
- 6.Tantangan dan Solusi dalam Pemberdayaan Berbasis Masjid

Buku ini tidak hanya menjadi panduan bagi aktivis masjid dan pengelola program sosial, tapi juga menjadi sumber inspirasi bagi siapa pun yang ingin melihat masjid sebagai lokomotif perubahan sosial. Berangkat dari nilai-nilai Islam dan semangat gotong royong, buku ini mengajak kita untuk merevitalisasi masjid sebagai ruang pemberdayaan umat yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

o
o
o
o

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASJID

Dr. Muhammad Nizar, M.E.I
Windari, S.E

 Penerbit:
Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya



KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASJID

2025



KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASJID

Dr. Muhammad Nizar, M.E.I
Windari, S.E

o
o
o
o



Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASJID

Dr. Muhammad Nizar, M.E.I
Windari, S.E

Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASJID

Penulis:

Dr. Muhammad Nizar, M.E.I

Windari, SE

Editor: Antin Rakhmawati

Diterbitkan oleh:

Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya

Jl. Watu Damar, Karangploso-Malang

e-mail: antinrakhmawati@gmail.com

Phone: 081249745821

yayasanrahmazarkurniajaya.my.id

Malang, 22 Juli 2025

ISBN: 978-634-04-1509-4



Tentang Hak Cipta

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, upload di situs, upload di sosial media, tanpa izin tertulis dari penerbit. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72 Ayat (1), (2), dan (6).

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kasih sayang-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan buku ini yang berjudul "Keterlibatan Masyarakat dalam Pemberdayaan Berbasis Masjid". Tanpa pertolongan-Nya, niscaya segala usaha dan ikhtiar ini tidak akan menemukan hasil yang maksimal. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, yang telah memberikan teladan terbaik dalam membangun masyarakat madani yang berkeadilan dan penuh kasih.

Buku ini lahir dari kegelisahan sekaligus harapan penulis atas peran masjid dalam kehidupan masyarakat modern. Masjid, sebagai institusi keagamaan, selama ini dikenal sebagai tempat ibadah dan pusat spiritual umat Islam. Namun, sejarah Islam mencatat bahwa masjid pada masa Rasulullah SAW bukan hanya sebagai tempat ibadah semata, tetapi juga berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan pemerintahan. Masjid adalah jantung peradaban Islam, dan peran itu harus terus dihidupkan di tengah tantangan zaman.

Penulis mencoba mengangkat kembali semangat itu melalui tulisan ini dengan menggambarkan bagaimana keterlibatan masyarakat secara aktif dapat menghidupkan masjid, dan bagaimana masjid dapat menjadi sarana pemberdayaan umat yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjadi hasil dari pengamatan,

wawancara, dan interaksi langsung dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan berbasis masjid, khususnya di Masjid Moekhlas Sidik atau yang dikenal dengan Masjid Merah, yang terletak di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur.

Dalam proses penyusunan buku ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan waktu, akses terhadap data, hingga proses penyuntingan isi. Namun, semua itu dapat terlewati berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang luas, menjadi bahan bacaan yang mencerahkan, serta inspirasi bagi siapa saja yang ingin menjadikan masjid sebagai pusat kebangkitan umat. Kritik dan saran yang membangun tentu sangat penulis harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Pasuruan, 22 Juli 2025

Windari, S.E

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
INFORMASI BUKU	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

BAB 1 KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN

1	
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemberdayaan	3
C. Tujuan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemberdayaan ..	5

BAB 2 LANDASAN TEORI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT	7
A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	7
B. Fungsi Dan Karakteristik Pemberdayaan	9
1. Kesukarelaan (Voluntary).....	10
2. Otonom	10
3. Keswadayaan (Self-help).....	11
4. Partisipatif.....	11
5. Egaliter.....	12
6. Demokratis.....	12
7. Keterbukaan	13
8. Kebersamaan.....	13
9. Akuntabilitas.....	13
C. Tahapan Dan Strategi Pemberdayaan.....	14
1. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	14
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	16

D. Prinsip-prinsip Pemberdayaan.....	18
1. Prinsip Partisipasi Aktif.....	19
2. Prinsip Kesetaraan	19
3. Prinsip Kemandirian	19
4. Keberlanjutan (Sustainability)	20
5. Transparansi dan Akuntabilitas	20
BAB 3 MASJID SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN.....	21
A. Pengertian Dan Fungsi Masjid	21
B. Peran Masjid Dalam Masyarakat.....	24
C. Konsep Pemberdayaan Berbasis Masjid.....	28
D. Masjid sebagai Pusat Aktivitas Sosial dan Ekonomi.....	31
BAB 4 BENTUK DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASJID	33
A. Pemberdayaan Pendidikan.....	33
B. Pemberdayaan Sosial.....	35
C. Pemberdayaan Ekonomi	38
BAB 5 STUDI KASUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS MASJID	41
A. Profil Masjid Merah (Masjid Moekhlas Sidiq).....	41
B. Peran Masyarakat dan Pengurus Masjid.....	44
C. Hasil Dan Dampak Pemberdayaan	47
BAB 6 TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASJID.....	53
A. Tantangan Dalam Pemberdayaan Berbasis Masjid	53
B. Strategi Dalam Pemberdayaaan Berbasis Masjid	59
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB 1

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang menghadapi berbagai masalah kependudukan, salah satunya yaitu perekonomian, seperti yang kita ketahui fenomena kemiskinan di Indonesia masih sulit dipecahkan (Wati, 2016). Kemiskinan di Indonesia menyebabkan berbagai masalah, seperti kebodohan, kelaparan, kesenjangan sosial, masalah kesehatan, dan tindakan kriminalitas yang semakin hari semakin meningkat. Berikut data kemiskinan di Indonesia.

Upaya Indonesia sangatlah banyak seperti program pemberdayaan ekonomi sudah diterapkan oleh pemerintah mulai dari program Inpres Desa Tertinggal (IDT) (Nezha, 2014). Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) (Priyadi, 1997), dan yang lainnya namun belum membuahkan hasil, seperti halnya penelitian Sulistyowati yang menyatakan bahwa banyak program pengentasan kemiskinan hanya terfokus pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, bukan mencari jalan keluar untuk meringankan beban kemiskinan dengan melalui usaha peningkatan kemampuan secara bertahap (Ristiana & Yusuf, 2020). Oleh karena itu, kemiskinan dan potensi keterlibatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta pemberdayaan ekonomi yang tidak dapat ditunda penanggulangannya (Galuh, 2019).

Untuk itu, Menggali potensi keterlibatan masyarakat merupakan langkah penting dalam upaya membangun komunitas yang lebih inklusif dan berdaya. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada partisipasi dalam kegiatan sosial atau keagamaan, tetapi juga mencakup peran aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan program, dan implementasi berbagai inisiatif yang dapat meningkatkan kualitas hidup (Endah et al., 2020). Masyarakat yang terlibat secara aktif memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar mereka dan mencari solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan local. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal, tetapi juga pada kekuatan internal komunitas itu sendiri. Pengelolaan sumber daya manusia yang optimal, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kapasitas sosial dan pendidikan adalah beberapa aspek yang dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat secara langsung (Utami et al., 2013). Melalui keterlibatan yang intensif dan berkesinambungan, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri, mampu mengatasi tantangan, dan mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci utama. Pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses tersebut (Wadu et al., 2020).

Potensi keterlibatan masyarakat menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan suatu pembangunan, karena keterlibatan ini mencerminkan kesadaran dan partisipasi

aktif warga dalam setiap aspek pembangunan baik itu ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat yang terlibat secara langsung akan memiliki rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan, yang pada gilirannya mendorong terciptanya keberlanjutan dan pemerataan manfaat (Sidik, 2015). Oleh karena itu, pembangunan yang memberdayakan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif.

B. Pengertian Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemberdayaan

Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Kirana, 2024). Partisipasi adalah proses di mana anggota komunitas saling mempengaruhi satu sama lain dan berbagi kendali atas upaya yang berkaitan dengan membuat, menerapkan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pemberdayaan, partisipasi ini melibatkan peran masyarakat sebagai subjek yang berkontribusi melalui gagasan, tenaga, atau sumber daya dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan rasa memiliki terhadap program, memperkuat solidaritas sosial, serta menghasilkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal (Noor, 2011). Adapun indikator partisipasi mencakup tingkat kehadiran dalam kegiatan, kontribusi pemikiran atau saran, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, serta kesiediaan untuk berkolaborasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan adalah suatu proses aktif di mana warga atau kelompok masyarakat berpartisipasi secara sadar dalam merencanakan, melaksanakan,

hingga mengevaluasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka. Dalam proses ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat (beneficiaries), tetapi sebagai pelaku utama yang memiliki peran, kontribusi, dan tanggung jawab dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Dengan kata lain, keterlibatan masyarakat adalah inti dari pendekatan pemberdayaan, karena partisipasi mereka menunjukkan adanya rasa memiliki, kesadaran kritis, dan kapasitas untuk mengelola potensi yang ada di lingkungan mereka sendiri (Sidik, 2015).

Secara konseptual, keterlibatan masyarakat mencakup beberapa aspek, antara lain: keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan, kontribusi terhadap sumber daya (baik materi, tenaga, maupun ide), serta peran aktif dalam pemantauan dan evaluasi. Partisipasi ini bisa bersifat formal maupun informal, sukarela maupun terorganisir. Menurut Cohen dan Uphoff, keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan melibatkan empat tahapan utama: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pemanfaatan hasil, dan 4) evaluasi. Semakin luas dan dalam keterlibatan masyarakat dalam keempat tahapan tersebut, semakin besar peluang terwujudnya pemberdayaan yang berkelanjutan dan efektif.

Menurut Ife dan Frank Tesoriero (2006), partisipasi masyarakat yang sejati akan tumbuh jika ada hubungan yang sejajar antara pengelola program dengan komunitas lokal. Ini menandakan bahwa keterlibatan masyarakat adalah bagian dari proses demokratisasi pembangunan, di mana suara masyarakat menjadi pusat dari setiap kebijakan atau program yang dirancang untuk mereka. Maka dari itu, pemberdayaan bukan hanya tentang membantu, tetapi tentang menciptakan ruang di

mana masyarakat memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri.

Pemberdayaan sendiri mengacu pada proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk menentukan pilihan, mengendalikan sumber daya, dan membangun masa depan mereka secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat bukan hanya bagian dari strategi teknis pembangunan, tetapi juga bagian dari proses transformasi sosial, yang menumbuhkan kesadaran, rasa percaya diri, dan solidaritas kolektif. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat yang bermakna, program-program pemberdayaan cenderung tidak berkelanjutan, karena tidak didukung oleh rasa memiliki dan partisipasi dari komunitas yang menjadi sasarannya.

C. Tujuan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemberdayaan

Tujuan utama dari keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan adalah untuk menciptakan kemandirian komunitas dalam mengelola kehidupannya sendiri. Keterlibatan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan yang pasif, tetapi mampu menjadi subjek aktif dalam proses perubahan sosial (Yugo Susanto, Sri Bangun Lestari, 2020). Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam berbagai program pembangunan, mereka akan memiliki rasa tanggung jawab, rasa memiliki, serta kesadaran kritis terhadap kondisi dan potensi lingkungan mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan Edi Suharto (2005) yang menyatakan bahwa “pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan mengatasi masalah mereka sendiri”.

Lebih dari sekadar pelibatan fisik, tujuan dari keterlibatan masyarakat adalah untuk memperkuat kapasitas individu dan kolektif dalam menyelesaikan persoalan secara mandiri. Pemberdayaan menghendaki peningkatan pada tiga aspek utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental. Ketika masyarakat diberikan ruang untuk terlibat dalam proses pemberdayaan, mereka berkesempatan untuk belajar, mengasah kemampuan, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Dalam pandangan Paulo Freire (1973), tujuan utama pemberdayaan adalah membebaskan masyarakat dari ketergantungan melalui proses penyadaran (*conscientization*), yaitu kemampuan untuk memahami realitas sosial secara kritis dan bertindak secara reflektif.

Keterlibatan masyarakat juga memiliki tujuan sosial yang lebih luas, yakni memperkuat solidaritas dan jaringan sosial di antara warga (Ummah, 2019). Melalui kerja sama dalam kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan, koperasi, atau forum diskusi terjadi interaksi yang mengikat hubungan sosial dan memperkuat modal sosial (*social capital*). James Coleman (1988) mengungkapkan bahwa modal sosial adalah sumber daya penting dalam masyarakat karena ia memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat juga bertujuan membangun rasa saling percaya (*trust*), saling menghargai, dan kerja kolektif yang berkelanjutan.

BAB 2

LANDASAN TEORI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat (Arsiyah et al., 2009). Manfaat dari pemberdayaan ini mencakup peningkatan kesejahteraan, partisipasi aktif dalam pembangunan, dan penguatan kapasitas sosial. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tingkat partisipasi, peningkatan keterampilan, dan perubahan dalam kualitas hidup masyarakat (Ruslan, 2012).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kesadaran, dan partisipasi masyarakat agar mampu mengelola kehidupan mereka secara mandiri, bermartabat, dan berkeadilan. Istilah “pemberdayaan” berasal dari kata “berdaya” yang berarti memiliki kekuatan atau kemampuan, sehingga secara etimologis, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai usaha untuk membuat masyarakat memiliki daya atau kekuatan dalam menentukan arah kehidupannya sendiri (Suryawati, 2021). Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan yang pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang mampu mengidentifikasi kebutuhan, memanfaatkan potensi, serta mengambil keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.

Secara konseptual, menurut Edi Suharto (2005), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola diri dan lingkungannya melalui proses pembelajaran dan partisipasi aktif. Pemberdayaan juga berfungsi sebagai strategi untuk mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong perubahan sosial yang berkeadilan. Sementara itu, menurut Kartasasmita (1996), pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap sumber daya, informasi, keterampilan, dan kesempatan yang sebelumnya tertutup atau terbatas.

Dalam perspektif pembangunan, pemberdayaan masyarakat menjadi alternatif dari pendekatan pembangunan konvensional yang bersifat top-down. Pendekatan ini lebih menekankan pada bottom-up process, yaitu pembangunan yang berangkat dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat akar rumput (Pratama, 2016). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan taraf hidup, tetapi juga memperkuat demokrasi, memperluas partisipasi publik, dan memperkecil ketimpangan sosial.

Dalam konteks pemberdayaan berbasis masjid, pengertian ini menjadi semakin luas karena menyentuh aspek spiritual, sosial, dan moral masyarakat. Masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Pemberdayaan melalui masjid berarti mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, menumbuhkan kesadaran kolektif, serta memperkuat solidaritas dan etos kerja yang islami.

B. Fungsi Dan Karakteristik Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat memiliki fungsi strategis dalam pembangunan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Fungsi utama dari pemberdayaan adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat (Sukmawati, 2018), sehingga mereka dapat mandiri dalam mengelola sumber daya, menyelesaikan persoalan hidup, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Melalui pemberdayaan, masyarakat diajak untuk tidak lagi bersifat pasif dan bergantung pada bantuan luar, tetapi justru menjadi subjek yang menentukan arah perubahan. Oleh karena itu, pemberdayaan memiliki fungsi edukatif (mendidik), produktif (mendorong kreativitas), partisipatif (melibatkan), dan transformatif (mengubah cara pandang dan struktur sosial).

Fungsi edukatif terlihat dalam proses pemberdayaan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk belajar, meningkatkan pengetahuan, serta memahami hak dan tanggung jawab sosial mereka. Fungsi produktif ditunjukkan melalui program-program yang mampu menghasilkan nilai tambah, baik secara ekonomi maupun sosial, seperti pelatihan usaha mikro, koperasi warga, atau pemberdayaan berbasis masjid yang memanfaatkan aset keumatan. Fungsi partisipatif muncul saat masyarakat dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sementara fungsi transformatif bekerja ketika masyarakat mulai menyadari kekuatan mereka sendiri dan berani mengubah struktur ketimpangan atau ketergantungan yang selama ini melemahkan.

Menurut Soedijanto sebagaimana dikutip oleh Totok Mardikanto (2012), pemberdayaan masyarakat memiliki

beberapa karakteristik penting yang menjadi prinsip dasar dalam perancangannya. Karakteristik ini mencerminkan nilai-nilai sosial, etika pembangunan, dan filosofi partisipasi yang seharusnya melandasi semua kegiatan pemberdayaan agar benar-benar menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya. Berikut adalah uraian rinci dari sembilan karakteristik yang dikemukakan:

1. Kesukarelaan (Voluntary)

Karakteristik pertama adalah bahwa keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan harus bersifat sukarela. Artinya, masyarakat ikut terlibat bukan karena tekanan, kewajiban administratif, atau paksaan pihak luar, melainkan karena adanya kesadaran dari dalam diri mereka untuk memperbaiki keadaan hidupnya. Kesukarelaan ini menjadi fondasi moral yang sangat penting. Dalam konteks masjid, misalnya, warga yang ikut pelatihan kewirausahaan atau pengelolaan zakat produktif hendaknya hadir karena keinginan untuk tumbuh dan belajar, bukan karena hanya ingin bantuan langsung tunai.

Kesukarelaan juga menunjukkan bahwa proses pemberdayaan membangun motivasi intrinsik masyarakat. Tanpa motivasi dari dalam, program sebesar apapun akan sulit menghasilkan perubahan jangka panjang. Dengan kata lain, kesadaran internal inilah yang akan menjadi penggerak utama dalam perubahan sosial yang berkelanjutan.

2. Otonom

Karakter ini merujuk pada tujuan akhir pemberdayaan: menciptakan kemandirian. Otonomi di sini bukan hanya sebatas bisa berdiri sendiri secara ekonomi, tetapi juga meliputi pengambilan keputusan secara mandiri, pengelolaan sumber daya secara lokal, serta kemampuan mengatasi masalah tanpa

selalu menunggu intervensi dari luar. Pemberdayaan yang berhasil harus mampu membebaskan masyarakat dari ketergantungan pada bantuan instan.

Dalam konteks pemberdayaan berbasis masjid, hal ini tampak ketika komunitas jamaah mulai mengelola koperasi sendiri, menentukan arah program sosial sendiri, atau menginisiasi pelatihan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri. Masjid menjadi pusat yang mendorong otonomi komunitas, bukan pusat ketergantungan.

3. Keswadayaan (Self-help)

Keswadayaan berarti bahwa pemberdayaan harus mendorong masyarakat untuk memiliki inisiatif, kemauan, dan keberanian mengambil keputusan sendiri. Ini bukan sekadar kemandirian dalam tindakan, tapi juga dalam cara berpikir. Masyarakat yang berdaya tidak pasif atau hanya menunggu, melainkan menjadi subjek yang aktif dan kreatif dalam mengubah nasibnya.

Misalnya, jamaah masjid yang mengusulkan program pelatihan sablon karena melihat potensi pasar lokal ini adalah bentuk nyata keswadayaan. Mereka tidak menunggu program datang dari pemerintah atau LSM, tetapi memulai langkah berdasarkan analisis mereka sendiri.

4. Partisipatif

Karakteristik ini menekankan bahwa semua warga komunitas harus dilibatkan secara aktif. Pemberdayaan yang partisipatif berarti masyarakat terlibat sejak awal dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab yang besar terhadap program.

Partisipasi juga menciptakan transparansi dan meningkatkan efektivitas. Dalam pemberdayaan berbasis masjid, bentuk partisipasi bisa berupa musyawarah jamaah, forum rembug warga, atau pelibatan warga dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah.

5. Egaliter

Pemberdayaan menuntut semua pihak yang terlibat diperlakukan secara setara. Baik fasilitator, tokoh masyarakat, pemuda, hingga warga biasa semuanya memiliki posisi yang sama dalam menentukan arah program. Tidak boleh ada dominasi elite atau marginalisasi kelompok tertentu.

Sikap egaliter ini penting agar program pemberdayaan benar-benar membangun kepercayaan sosial dan tidak menciptakan ketimpangan baru. Dalam konteks masjid, prinsip ini memastikan bahwa semua jamaah baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara dan akses yang sama terhadap program masjid.

6. Demokratis

Karakteristik demokratis berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, mengusulkan program, dan menyampaikan kritik. Pemberdayaan yang demokratis tidak menutup ruang dialog, bahkan mendorongnya sebagai bagian dari pembelajaran sosial.

Dengan suasana demokratis, masyarakat menjadi terbiasa berdiskusi, musyawarah, dan mengambil keputusan kolektif. Ini memperkuat modal sosial dan budaya musyawarah mufakat dalam masyarakat. Dalam kegiatan masjid, ini bisa terlihat dalam rapat takmir terbuka, atau forum evaluasi kegiatan yang melibatkan jamaah.

7. Keterbukaan

Kegiatan pemberdayaan harus dilakukan secara jujur dan transparan. Semua pihak berhak tahu bagaimana dana digunakan, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana hasil dicapai. Keterbukaan menciptakan rasa percaya antarwarga dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Transparansi dalam pemberdayaan berbasis masjid, misalnya, bisa ditunjukkan dengan mempublikasikan laporan keuangan infaq/zakat di papan pengumuman, atau menyampaikan laporan kegiatan secara rutin kepada jamaah.

8. Kebersamaan

Pemberdayaan menekankan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang saling mendukung, saling membantu, dan bersama-sama bergerak untuk memperbaiki kondisi sosial. Semangat kolektif ini merupakan ciri khas budaya Indonesia dan sangat sejalan dengan ajaran Islam.

Program-program pemberdayaan yang dibangun atas dasar kebersamaan cenderung lebih kuat, karena masyarakat saling menyemangati dan saling menjaga. Masjid menjadi tempat yang strategis untuk membangun kebersamaan ini melalui kegiatan seperti kerja bakti, sedekah bersama, atau kajian yang memupuk solidaritas.

9. Akuntabilitas

Karakteristik akuntabilitas menekankan bahwa seluruh proses pemberdayaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Baik secara moral, administratif, maupun sosial, pelaksanaan program harus terbuka untuk diawasi, dikritik, dan dievaluasi. Akuntabilitas menciptakan kepercayaan dan memperkuat legitimasi sosial.

Dalam praktik pemberdayaan masjid, akuntabilitas bisa dilaksanakan melalui pelaporan keuangan secara berkala, pengawasan oleh dewan pengurus, atau evaluasi bersama dengan tokoh masyarakat.

C. Tahapan Dan Strategi Pemberdayaan

Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah kegiatan instan, melainkan suatu proses bertahap yang membutuhkan perencanaan matang, pelibatan aktif masyarakat, dan strategi pelaksanaan yang relevan dengan konteks sosial-budaya setempat. Menurut berbagai ahli, termasuk Soetomo (2006), pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui tahapan yang saling berkaitan dan berkesinambungan, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat yang mandiri, kritis, dan berdaya secara sosial, ekonomi, serta spiritual.

1. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

1. Tahap Persiapan (Pra-Kondisi)

Tahap ini merupakan langkah awal dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini, dilakukan pengenalan terhadap lingkungan masyarakat yang akan diberdayakan. Kegiatan utama meliputi identifikasi permasalahan, pemetaan potensi sumber daya lokal, dan pendekatan sosial dengan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah membangun hubungan yang akrab dan kepercayaan antara fasilitator dan masyarakat. Dalam pemberdayaan berbasis masjid, tahap ini bisa dilakukan dengan mengadakan forum jamaah, safari dakwah ke lingkungan sekitar, atau survei kebutuhan warga secara informal.

2. Tahap Penyadaran (Awareness)

Setelah hubungan terbangun, masyarakat diajak untuk menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan potensi yang

sebenarnya mereka miliki. Penyadaran ini sangat penting karena banyak komunitas terjebak dalam ketergantungan atau pasrah terhadap keadaan. Proses ini bisa dilakukan melalui penyuluhan, ceramah, diskusi kelompok, atau pelatihan awal yang sifatnya membangkitkan semangat. Masjid dapat memanfaatkan forum keagamaan seperti khutbah, pengajian, dan diskusi fiqh muamalah sebagai media penyadaran.

3. Tahap Penguatan Kapasitas (Capacity Building)

Pada tahap ini, masyarakat diberikan pelatihan, pengetahuan, dan keterampilan praktis sesuai kebutuhan mereka. Contohnya adalah pelatihan wirausaha, keterampilan menjahit, beternak, membuat kerajinan, literasi digital, atau manajemen keuangan. Tujuannya adalah memberikan bekal agar masyarakat dapat bergerak secara mandiri. Masjid bisa berperan aktif dengan menyediakan ruang pelatihan, mengundang narasumber ahli, atau membentuk kelompok belajar jamaah.

4. Tahap Pendampingan dan Pelaksanaan

Setelah masyarakat memiliki bekal, mereka mulai mengimplementasikan program pemberdayaan yang dirancang. Misalnya, membuka usaha, menjalankan koperasi, atau mengelola program sosial berbasis komunitas. Dalam tahap ini, fasilitator tetap hadir sebagai pendamping yang memberikan arahan jika diperlukan, tanpa mengendalikan secara langsung. Peran masjid bisa diperluas sebagai tempat produksi, promosi produk, atau pusat distribusi zakat produktif.

5. Tahap Evaluasi dan Kemandirian

Tahap akhir ini adalah saat masyarakat mengevaluasi hasil kegiatan dan menilai apakah mereka sudah mampu mandiri atau masih membutuhkan dukungan. Evaluasi

dilakukan untuk mengukur pencapaian, hambatan, dan langkah perbaikan. Jika telah mandiri, masyarakat bisa mereplikasi model pemberdayaan ke lingkungan sekitar. Masjid tetap dapat berperan sebagai penghubung jaringan dan sumber pembinaan moral-spiritual.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan masyarakat, dapat dilakukan dengan menjangkau masyarakat sebanyak mungkin. Benih-beenih pemberdayaan ditaburkan di belrbagai tingkat masyarakat dan pada akhirnya mengarah pada adaptasi masyarakat, melakukan penyempurnaan dan peningkatan yang disesuaikan dengan potensi, masalah dan kebultulhan, serta meltodel dan pendekatan mereka. Dibawah ini adalah model dan perwujudan strategi kemampuan dan kemandirian pemberdayaan masyarakat yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan pelrlindungan iklim.⁷ Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi sebagai berikut:

- a. Enabling, yaitul proses menciptakan iklim atau suasana. yang membulat potensi masyarakat dapat berkembang. Menyadarkan setiap individu mauupun masyarakat bahwa mereka memiliki potensi, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki daya (kekuatan) masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- b. Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas atau daya dengan cara memperkuat potensi yang telah dimiliki masyarakat. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan

ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar, prasarana dan sarana.

- c. Protecting, yaitu membuat sistem perlindungan yang dapat melindungi masyarakat sebagai subjek pengembangan. Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Dan terdapat juga strategi yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Strategi Pendidikan dan Penyadaran

Strategi ini berfokus pada peningkatan pengetahuan, kesadaran kritis, dan perubahan pola pikir masyarakat. Pendidikan tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga melalui pendekatan informal seperti pengajian, diskusi, dan pelatihan keterampilan. Dalam Islam, pendidikan merupakan kunci perubahan, sebagaimana sabda Nabi SAW: "Barangsiapa menghendaki kebaikan, maka Allah menjadikannya paham agama." (HR. Bukhari).

- b. Strategi Advokasi

Advokasi dilakukan untuk membantu masyarakat memperjuangkan hak-haknya, terutama dalam bidang pelayanan publik, hukum, dan kebijakan. Masjid bisa menjadi ruang yang mendampingi warga yang tertindas atau tidak mendapatkan layanan negara secara adil. Misalnya, dengan membuka layanan konsultasi hukum, atau membantu warga mengakses bantuan sosial.

- c. Strategi Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian penting agar pemberdayaan menjadi gerakan kolektif, bukan tindakan individu. Masyarakat dibentuk dalam kelompok-kelompok kerja, komunitas UMKM, kelompok pemuda masjid, kelompok ibu-ibu kreatif, dan

sebagainya. Pengorganisasian memudahkan distribusi informasi, pembagian peran, serta pengambilan keputusan yang demokratis.

d. Strategi Penguatan Ekonomi

Aspek ekonomi menjadi inti dari banyak kegiatan pemberdayaan. Strategi ini dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, pembuatan koperasi syariah, hingga pemasaran produk. Dana sosial seperti zakat, infaq, dan wakaf dapat diolah secara produktif untuk mendukung program ini. Masjid yang mengelola dana tersebut secara amanah dapat menjadi penggerak ekonomi jamaah.

e. Strategi Kemitraan dan Jejaring (Networking)

Pemberdayaan tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, LSM, kampus, dan dunia usaha. Masjid dapat menjalin kemitraan strategis untuk mengakses sumber daya pelatihan, pembiayaan, atau bantuan teknis. Kemitraan ini memperluas cakupan dan daya tahan program pemberdayaan.

D. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilandasi oleh tahapan dan strategi teknis semata, melainkan juga dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang menjadi landasan etis dan filosofis dalam pelaksanaannya (Muslim, 2007). Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman agar proses pemberdayaan tetap berpihak kepada masyarakat, menjunjung keadilan, serta membangun relasi sosial yang sehat antara fasilitator dan warga. Tanpa prinsip yang kuat, pemberdayaan bisa jatuh pada manipulasi, ketergantungan baru, atau bahkan eksploitasi. Berikut terdapat Beberapa Prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Partisipasi Aktif

Prinsip partisipasi aktif yang mana dalam Pemberdayaan yang efektif menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama (subjek), bukan sebagai objek semata. Artinya, masyarakat harus dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki terhadap program serta meningkatkan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks masjid, partisipasi aktif bisa dilihat ketika jamaah ikut merancang program pelatihan keterampilan, bergabung dalam koperasi jamaah, atau mengelola kegiatan sosial seperti distribusi zakat dan sedekah secara gotong royong.

2. Prinsip Kesenyamaan

Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan memiliki kedudukan yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, pendidikan, ekonomi, atau gender. Dalam Islam, konsep kesetaraan sangat ditekankan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab kecuali dengan ketakwaan” (HR. Ahmad). Dalam praktik pemberdayaan di masjid, prinsip ini mengajarkan bahwa pengurus, tokoh agama, dan jamaah biasa semua memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari kegiatan pemberdayaan.

3. Prinsip Kemandirian

Prinsip kemandirian menunjukkan bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah agar masyarakat mampu mengandalkan diri sendiri tanpa ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan luar. Proses pemberdayaan harus mendorong masyarakat untuk percaya pada kemampuannya, memiliki

inisiatif, dan mengelola sumber daya secara mandiri. Di masjid, prinsip ini dapat diterapkan melalui pelatihan kewirausahaan yang menghasilkan usaha mandiri jamaah, atau program zakat produktif yang memungkinkan penerimanya menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan.

4. Keberlanjutan (Sustainability)

Keberlanjutan berarti bahwa hasil pemberdayaan tidak bersifat sementara, tetapi dirancang untuk bertahan dalam jangka panjang. Program-program yang berkelanjutan tidak bergantung pada proyek atau pendanaan jangka pendek, melainkan memperkuat kelembagaan, kapasitas masyarakat, dan regenerasi kader. Di masjid, contoh penerapan prinsip ini adalah ketika unit usaha masjid (koperasi, BMT, UMKM) dikelola secara profesional dan tetap berjalan meskipun program eksternal telah berakhir.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi berarti keterbukaan dalam setiap proses dan pengelolaan kegiatan, terutama dalam hal keuangan dan pengambilan keputusan. Akuntabilitas menunjukkan bahwa semua tindakan dalam pemberdayaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Prinsip ini sangat penting agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pengelola program. Dalam konteks masjid, prinsip ini bisa dilihat dari laporan keuangan yang diumumkan secara terbuka, musyawarah rutin dengan jamaah, serta dokumentasi kegiatan yang rapi.

BAB 3

MASJID SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN

A. Pengertian Dan Fungsi Masjid

Kata “masjid” terulang sebanyak dua puluh delapan kali di dalam AlQur’an. Dari segi akar kata “masjid” di ambil dari kata *sajada yasjudu*, yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzhim. Meletakkan dahi, kedua tangan dan lutut, serta kedua ujung kaki ke bumi, yang kemudian dinamakan sujud oleh syari’at. Sujud adalah bentuk lahiriah yang paling nyata dari makna di atas. Itulah sebabnya mengapa bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan shalat diberi nama masjid, yang artinya tempat bersujud. Selain itu, masjid juga merupakan tempat orang berkumpul dan melaksanakan shalat secara berjamaah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan kaum muslimin, dan di masjid pulalah tempat terbaik untuk melangsungkan shalat jum’at.

Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum muslimin. Tetapi, karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, oleh karena itu, hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah swt.

Dalam tafsir Al-Misbah di jelaskan bahwa Kata **المساجد** al-masajid adalah bentuk jamak kata **المسجد** masjid, yakni tempat sujud. Yang memahaminya sebagai seluruh persada bumi beralasan sabda Nabi saw, yang menyatakan “Dijadikan untukku dan umatku persada bumi ini sebagai tempat sujud”. Ada juga ulama yang memahaminya sebagai bentuk jamak dari kata **(المسجد)** masjid dan yang mereka maksud adalah anggota

badan manusia yang diperintahkan oleh Rasul agar bersujud, yaitu dahi, hidung, kedua lutut, kedua tangan dan kedua kaki. Maksud ayat ini, menurut mereka adalah: Allah telah menganugerahkan anggota badan itu sebagai nikmat maka janganlah kamu menggunakannya sujud kepada selain Allah. Ada lagi yang memahami ayat di atas dalam arti jadikanlah masjid sebagai tempat sujud dan ibadah kepada Allah semata.

Dalam konteks sejarah, sejak masa Rasulullah SAW di Madinah, masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat dakwah, pendidikan, peradilan, musyawarah, bahkan strategi perang. Masjid Nabawi, misalnya, menjadi model masjid multifungsi yang mendukung pembangunan masyarakat secara utuh. Dari masjid, Rasulullah membina umat, menyampaikan ajaran Islam, menyelesaikan konflik, hingga mengatur kebijakan sosial-politik. Hal ini menunjukkan bahwa masjid secara fungsional adalah lembaga masyarakat Islam yang integral dan strategis.

Di era modern, peran masjid mulai direvitalisasi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Fungsi masjid mengalami perluasan dari sekadar tempat ibadah menjadi pusat pembinaan umat, pengembangan ekonomi, pendidikan, sosial, hingga pelayanan kesehatan. Masjid dapat dijadikan basis pemberdayaan melalui berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan perempuan, koperasi syariah, pendidikan anak-anak dan remaja, serta penyaluran dana zakat, infaq, dan wakaf untuk kegiatan produktif. Dengan demikian, masjid menjadi institusi yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Fungsi masjid dalam pemberdayaan juga sejalan dengan visi Islam sebagai agama yang menyentuh seluruh aspek

kehidupan. Al-Qur'an memuji masjid yang dibangun atas dasar takwa dan digunakan untuk kebaikan umat: "Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu beribadah di dalamnya..." (QS. At-Taubah: 108). Ayat ini mengisyaratkan bahwa masjid ideal adalah yang tidak hanya memperkuat hubungan manusia dengan Allah (ḥablum minallāh), tetapi juga memperkuat hubungan antarmanusia (ḥablum minannās) dalam bentuk pelayanan dan pemberdayaan.

Masjid, sebagai bagian dari fasilitas sosial umat, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya umat Islam untuk melaksanakan ibadah, yang merupakan kebutuhan spiritual esensial bagi manusia. Menurut Ayub, terdapat sembilan peran penting yang dapat dijalankan masjid dalam mendukung proses pemberdayaan masyarakat.

1. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf membersihkan diri sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat berkonsultasi mengajukan kesulitan-kesulitan meminta bantuan dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
6. Masjid dengan Majelis Ta'limnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan.

7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat.
8. Masjid adalah tempat menghimpun dana, menyimpan dan membagikannya.
9. Masjid adalah tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.

B. Peran Masjid Dalam Masyarakat

Peran masjid dalam pembangunan umat sangatlah besar dan vital. Gazalba mengatakan bahwa selain sebagai pusat ibadah, masjid juga berperan sebagai pusat kebudayaan atau peradaban. Masjid merupakan lembaga atau organisasi pertama dan utama dalam Islam. Masjid sebagai pusat peradaban memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan, membangun kapabilitas intelektual umat, meningkatkan perekonomian umat, dan menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi permasalahan umat terkini.

Masjid dalam tradisi Islam bukanlah sekadar tempat ibadah semata, tetapi juga berfungsi sebagai institusi sosial yang sangat strategis dalam membangun peradaban umat. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid telah memainkan peran penting dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Masjid menjadi tempat umat berkumpul, belajar, bermusyawarah, menyelesaikan masalah, dan membentuk solidaritas sosial. Oleh sebab itu, peran masjid sangat penting untuk terus dikembangkan agar mampu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas dan kontekstual dengan kebutuhan zaman.

Sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid sebagai bentuk dan upaya untuk membangun masyarakat madani (Nurjamilah, 2017). Peran masjid bagi pengembangan umat Islam sangat besar dan vital karena masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, namun juga sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Pemberdayaan ditujukan agar masyarakat mampu meningkatkan kualitas kehidupannya untuk berdaya, memiliki daya saing dan mandiri. Pemberdayaan dalam mengentas kemiskinan dapat dilakukan dengan mengubah mindset individu dan masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Qs. Ar-Ra'd: 11)

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hal pemberdayaan perlunya perubahan pada pola pikir masyarakat itu sendiri untuk berdaya, mandiri dan tidak hanya mengandalkan bantuan

dari pemerintah saja. Maka dari itu perlu dibentuknya pemberdayaan pada masyarakat.

Ada empat peranan dari fungsi masjid, yakni sebagai tempat ibadah (pembinaan iman dan takwa) itu sendiri, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia, dan ekonomi. Bila kita pantau secara jelas dan mendalam lagi secara rinci, maka akan banyak terlihat keberfungsian masjid tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri yang dinukil oleh yulianto bahwa sejarah Masjid Nabawi di Madinah yang didirikan oleh Rasulullah saw memiliki tidak kurang dari sepuluh peranan dan fungsi. Di antaranya adalah sebagai tempat dalam melakukan urusan ibadah (shalat dan zikir), konsultasi dan membentuk komunikasi, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, santunan sosial, latihan militer dan persiapan peralatannya, pengobatan korban perang, perjanjian perdamaian, pengadilan sengketa, menerima tamu, menawan tahanan perang, serta pusat penerangan dan pembelaan agama.⁶⁶

Peran utama masjid tentu terletak pada fungsinya sebagai tempat ibadah dan pembinaan spiritual umat. Aktivitas seperti salat berjamaah, dzikir, pengajian, dan khutbah Jumat merupakan sarana untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, kesabaran, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Masjid menjadi pusat pembentukan akhlak dan karakter umat. Dari sinilah fondasi moral masyarakat dibangun. Ketika fungsi spiritual ini dijalankan secara optimal, masyarakat akan memiliki kesadaran kolektif untuk berbuat baik dan menjauhi keburukan, yang pada akhirnya berdampak pada harmonisasi sosial.

Selain fungsi spiritual, masjid juga memiliki peran signifikan dalam bidang pendidikan. Masjid sejak dulu dikenal sebagai tempat belajar, baik ilmu agama maupun pengetahuan umum. Di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, masjid adalah tempat para sahabat belajar langsung dari Nabi. Dalam konteks sekarang, fungsi ini masih bisa terus dihidupkan melalui berbagai kegiatan edukatif seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), madrasah diniyah, kajian kitab, pelatihan dakwah, hingga pelatihan keterampilan hidup. Dengan memperluas spektrum pendidikan di masjid, masyarakat dapat diberi bekal keilmuan yang seimbang antara aspek spiritual dan praktis.

Peran sosial masjid pun tidak kalah penting. Masjid adalah pusat kepedulian dan solidaritas umat (Karim, 2020). Di dalamnya lahir berbagai program sosial seperti santunan anak yatim, bantuan kepada fakir miskin, penyaluran zakat dan infaq, bahkan aksi kemanusiaan saat bencana. Masjid menjadi titik kumpul masyarakat dalam semangat gotong royong dan kebersamaan. Melalui peran ini, masjid menjadi alat untuk merawat kepedulian sosial yang menjadi inti ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang, cinta, dan belas kasih di antara mereka adalah seperti tubuh; ketika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur” (HR. Bukhari dan Muslim).

Masjid juga berpotensi besar dalam peran pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional, masjid dapat memanfaatkan dana zakat, infaq, dan wakaf untuk kegiatan produktif. Contohnya, melalui pelatihan usaha kecil, pembentukan koperasi syariah, pengelolaan wakaf

produktif, hingga mendampingi jamaah dalam membangun usaha mandiri. Banyak masjid saat ini telah mulai mengembangkan ekonomi umat dengan mendirikan BMT, toko jamaah, atau memfasilitasi bazar UMKM. Dengan demikian, masjid bisa menjadi pilar ekonomi umat yang adil dan mandiri, sesuai semangat ekonomi Islam.

C. Konsep Pemberdayaan Berbasis Masjid

Pemberdayaan masyarakat berbasis masjid melalui program layanan sosial ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat (Muhtadi, 2018). Melalui arti ini, pemberdayaan dapat dimaknai “mengubah dari yang tidak mampu menjadi mampu atau mengubah dari yang tidak berdaya menjadi kuat”. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya. Dalam konteks masjid, masjid yang memberdayakan masyarakat adalah masjid yang mampu menguatkan masyarakatnya ke arah lebih baik. Lebih umum lagi, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri (Ridwanullah & Herdiana, 2018). Keberhasilan pemberdayaan berbasis masjid dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam program masjid, hasil dari inisiatif yang dilaksanakan, dan dampak positif yang dirasakan, seperti peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup (Jawahir & Uyuni, 2019).

Masjid diharapkan dapat menjadi pusat pencapaian kesejahteraan umat. Keberfungsian masjid dalam peningkatan kualitas kesejahteraan umat sangat diharapkan. Masjid harus

menjadi basis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Masjid diharapkan dapat menjadi pusat semua kegiatan masyarakat, baik kegiatan formal maupun informal. Masjid seyogyanya dapat dijadikan sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat atau umat dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia, yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera lahir batin. Potret pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dapat dilaksanakan melalui keikutsertaan remaja dalam kegiatan masjid, mengadakan berbagai jenis pelatihan dan seminar, menjadikan masjid sebagai pusat ilmu, memberdayakan fakir miskin yang menjadi tanggung jawab masjid dan menumbuhkan kemandirian masjid.

Pemberdayaan berbasis masjid adalah suatu pendekatan pembangunan masyarakat yang menempatkan masjid sebagai pusat kegiatan, sumber inspirasi, dan penggerak utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup umat. Konsep ini muncul dari kesadaran bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah ritual, tetapi juga institusi sosial yang sangat strategis dalam membina dan menggerakkan masyarakat ke arah kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan. Pemberdayaan berbasis masjid memadukan antara nilai spiritualitas Islam dengan aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Masjid memiliki potensi struktural dan kultural yang sangat besar untuk menjadi pusat pemberdayaan. Secara struktural, masjid biasanya dikelola oleh tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh, kedekatan emosional dengan warga, serta legitimasi keagamaan. Sementara itu, secara kultural, masjid merupakan tempat yang dipercaya oleh masyarakat, menjadi rujukan dalam persoalan moral, spiritual, dan sosial.

Oleh karena itu, menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat dari dalam, berbasis pada kekuatan yang sudah ada dan telah lama hidup dalam tradisi umat Islam.

Konsep pemberdayaan berbasis masjid bertumpu pada prinsip bahwa setiap individu dan komunitas memiliki potensi yang dapat dikembangkan, serta hak untuk berperan aktif dalam pembangunan. Dengan masjid sebagai titik sentral, proses pemberdayaan dapat diarahkan agar menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin, marginal, dan rentan. Melalui masjid, pemberdayaan tidak hanya menasar pada aspek ekonomi dan pendidikan, tetapi juga menyentuh sisi batiniah dan akhlak masyarakat, yang sering kali terabaikan dalam model pemberdayaan konvensional.

Model pemberdayaan berbasis masjid bisa diterapkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Di bidang ekonomi, masjid bisa menjadi pusat pelatihan keterampilan, pembentukan koperasi syariah, atau pengelolaan dana zakat dan wakaf secara produktif. Di bidang sosial, masjid bisa menjalankan program bantuan untuk dhuafa, konseling keluarga, hingga pemberdayaan anak jalanan. Di bidang pendidikan, masjid bisa menyelenggarakan taman pendidikan Al-Qur'an (TPA), kelas literasi, pelatihan remaja, atau pendidikan orang tua. Semua kegiatan ini dilakukan dengan semangat partisipatif dan gotong royong, serta mengedepankan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Dalam Al-Qur'an, fungsi masjid tidak dibatasi hanya untuk ibadah, tetapi juga sebagai tempat yang aktif membentuk masyarakat taqwa. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama

adalah lebih patut kamu beribadah di dalamnya...” (QS. At-Taubah: 108). Ayat ini mengandung pesan bahwa masjid ideal adalah yang dibangun untuk mencetak manusia bertakwa, yang berarti juga berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, peduli, dan berdaya. Maka, konsep pemberdayaan berbasis masjid adalah realisasi dari nilai ketakwaan sosial yang menjadi cita-cita Islam.

Di era modern, penerapan konsep ini menjadi semakin penting karena banyak masalah sosial yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah saja. Masjid sebagai institusi masyarakat sipil memiliki peran besar dalam menjembatani kebutuhan umat yang sering kali tertinggal secara ekonomi dan pendidikan. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya dibantu, tetapi juga diberdayakan diberi pengetahuan, keterampilan, dan akses agar dapat mandiri serta meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan.

D. Masjid sebagai Pusat Aktivitas Sosial dan Ekonomi

Masjid sebagai institusi keagamaan tidak hanya memainkan peran spiritual, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi umat. Dalam sejarah Islam, masjid telah menjadi tempat terjadinya berbagai kegiatan sosial, seperti musyawarah masyarakat, pengadilan, pendidikan, hingga pengumpulan dan distribusi zakat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi masjid sangat luas dan fleksibel, serta mampu menjangkau dimensi kehidupan umat secara menyeluruh. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, masjid dapat dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan sosial dan penggerak ekonomi berbasis komunitas.

Masjid sebagai lembaga sosial memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Pengertian masjid dalam konteks ini mencakup fungsinya sebagai wadah untuk membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Manfaat dari peran masjid sebagai lembaga sosial dan pemberdayaan antara lain adalah peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial, pengembangan kapasitas individu melalui program pendidikan dan pelatihan, serta penguatan jaringan sosial yang dapat mendukung kesejahteraan bersama. Indikator keberhasilan pemberdayaan melalui masjid dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan masjid, keberhasilan program-program yang dilaksanakan, serta dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, seperti peningkatan keterampilan dan kesejahteraan ekonomi (Karim, 2020).

Secara sosial, masjid adalah ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam satu tempat ibadah yang sama. Hal ini menjadikannya sebagai wadah strategis untuk membangun solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan sosial. Melalui masjid, kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, bantuan untuk fakir miskin, penanggulangan bencana, hingga program kesehatan dan pendidikan masyarakat dapat diselenggarakan secara rutin dan terorganisasi. Bahkan, masjid juga dapat menjadi tempat penyuluhan keluarga, penguatan peran pemuda, serta forum dialog antarwarga untuk menyelesaikan konflik sosial.

BAB 4

BENTUK DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASJID

A. Pemberdayaan Pendidikan

Masjid memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia pendidikan umat Islam. Sejak zaman Rasulullah SAW, masjid telah menjadi pusat utama pembinaan ilmu dan akhlak, tempat sahabat-sahabat menimba pengetahuan agama dan berbagai keterampilan sosial. Tradisi ini berlanjut hingga sekarang, menjadikan masjid sebagai lembaga pendidikan non-formal yang sangat dekat dengan masyarakat. Pendidikan berbasis masjid tidak hanya terbatas pada pengajaran agama, tetapi juga meliputi pembentukan karakter, peningkatan literasi dasar, serta pelatihan keterampilan hidup yang bermanfaat bagi umat (Ninla Elmawati Falabiba, 2019).

Pemberdayaan pendidikan yang dilakukan melalui masjid pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan di masjid yaitu;

1. Pelatihan dakwah, kebudayaan dan kaderisasi umat dengan mengkaji berbagai persoalan Islam.
2. Ruang diskusi, yang digunakan untuk berdiskusi sebelum dan sesudah shalat jamaah. Program inilah yang dikenal dengan istilah “I’tikaf Ilmiah”. Langkah-langkah praktis yang ditempuh dalam operasionalisasinya adalah memberikan perencanaan terlebih dahulu dengan menampilkan beberapa pokok persoalan yang akan dibahas. Setelah berkumpul para audien (makmum), diskusi dapat dimulai pada ruang yang telah tersedia. Kira-

kira sepuluh sampai lima belas menit sebelum shalat jamaah, diskusi dihentikan dan kemudian beralih pada “i’tikaf profetik” (dzikir). Sebaliknya, jika diskusi ini dilakukan sesuai shalat jamaah, i’tikaf profetik didahulukan dan kemudian diganti dengan i’tikaf ilmiah. Agar tak terlalu menjemukan diskusi ini dilakukan dua atau tiga minggu sekali. Ruang kuliah, yang digunakan untuk mendidik remaja masjid, seperti pendidikan formal lainnya yang memiliki kurikulum, dan materi pelajaran sesuai dengan pendidikan formal lainnya.

3. Kegiatan pengajian, baik untuk anak-anak, remaja, dewasa, maupun para orang tua. Baik laki-laki maupun perempuan. Disamping itu juga perlu dilakukan pengajian yang bersifat umum agar para jamaah umum dari berbagai kalangan dapat ikut serta dalam kegiatan masjid.

Pendidikan yang diselenggarakan di masjid juga mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, masjid juga bisa berperan sebagai pusat pengembangan pendidikan masyarakat yang lebih luas. Misalnya, dengan menyelenggarakan program pemberantasan buta huruf Al-Qur’an bagi orang dewasa, pelatihan bahasa Arab dasar, atau kelas bimbingan belajar bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Beberapa masjid bahkan telah mengembangkan pelatihan kewirausahaan, pelatihan digital, hingga kursus keterampilan seperti menjahit atau membuat produk UMKM. Dengan cara ini, masjid tidak hanya mencetak pribadi-pribadi yang taat beragama, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi umat melalui jalur pendidikan.

Pemberdayaan pendidikan di masjid harus dijalankan dengan pendekatan yang partisipatif, kontekstual, dan inklusif. Artinya, masyarakat sekitar masjid perlu dilibatkan secara aktif dalam merancang dan menjalankan program, agar kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Program pendidikan yang tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga memberi bekal keterampilan aplikatif akan memberikan dampak jangka panjang bagi kemandirian individu maupun kolektif masyarakat.

Masjid sebagai lembaga pendidikan idealnya tidak berdiri sendiri, tetapi bersinergi dengan berbagai elemen lain seperti sekolah formal, lembaga zakat, organisasi pemuda, dan pemerintah setempat. Kolaborasi ini dapat memperkuat keberlangsungan program, meningkatkan kualitas pengajar, dan memperluas jangkauan manfaat. Masjid yang mampu menjalankan fungsi pendidikan secara baik akan berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat Muslim yang berpengetahuan, berakhlak, dan berdaya saing di tengah tantangan zaman.

B. Pemberdayaan Sosial

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memiliki peran vital dalam pembangunan dan pemberdayaan sosial masyarakat. Dalam konteks Islam, hubungan antarumat tidak hanya dibangun melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui kepedulian sosial yang diwujudkan dalam bentuk tolong-menolong, solidaritas, dan gotong royong (Zubaidah et al., 2024). Oleh karena itu, pemberdayaan sosial berbasis masjid merupakan upaya penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan saling peduli.

Pemberdayaan sosial melalui masjid mencakup berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam aspek sosial dan kemanusiaan (Shukri & Hamid, 2015). Program-program seperti santunan anak yatim, bantuan kepada fakir miskin, layanan kesehatan gratis, pembagian sembako, serta pendampingan keluarga kurang mampu adalah beberapa bentuk konkret aktivitas sosial yang dilakukan banyak masjid di Indonesia. Masjid juga dapat berfungsi sebagai pusat mediasi konflik masyarakat, tempat konsultasi keluarga, serta ruang berkumpul untuk mempererat silaturahmi dan musyawarah warga.

Salah satu bentuk konkret dari peran sosial masjid adalah sebagai tempat pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dalam hal ini, masjid sering kali menjadi pusat kegiatan Baitul Maal, yang menerima titipan dana umat dan mengelolanya sesuai prinsip-prinsip syariah dan asas keadilan sosial. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program sosial masjid. Ketika jamaah tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat sebagai relawan atau pengelola kegiatan, maka semangat kepedulian dan kebersamaan akan semakin kuat. Dana ZISWAF yang terkumpul tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan konsumtif seperti bantuan langsung tunai, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial produktif seperti penyantunan anak yatim, khitanan massal, pembagian zakat fitrah, hingga pemotongan hewan kurban yang menyasar keluarga-keluarga kurang mampu.

Fungsi sosial masjid yang demikian ini menciptakan jembatan komunikasi dan solidaritas antara kelompok

masyarakat yang memiliki kelebihan harta dengan mereka yang membutuhkan. Interaksi ini membentuk kesadaran kolektif dan memperkuat kohesi sosial di lingkungan sekitar masjid. Dalam jangka panjang, pengelolaan ZISWAF yang baik mampu mengangkat derajat ekonomi masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial yang sering menjadi sumber masalah sosial.

Selain pengelolaan dana sosial, masjid juga sering difungsikan sebagai pusat pelayanan umum. Beberapa masjid telah menyediakan fasilitas ruang perawatan jenazah, klinik kesehatan, bahkan layanan konsultasi keluarga dan pendidikan anak. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut menjadikan masjid sebagai titik akses penting bagi kebutuhan sosial dasar masyarakat. Di beberapa wilayah, masjid juga berfungsi sebagai tempat belajar dan pelatihan keterampilan untuk anak-anak, remaja, hingga lansia, menunjukkan bahwa masjid benar-benar berada di jantung kehidupan masyarakat.

Masjid juga memiliki potensi besar dalam pemberdayaan sosial berbasis komunitas, misalnya melalui program pelatihan kesehatan ibu dan anak, pendampingan remaja masjid, penyuluhan pernikahan dan keluarga sakinah, serta kampanye kebersihan lingkungan. Semua program tersebut jika dikelola secara rutin dan berkelanjutan dapat menciptakan perubahan sosial yang signifikan di tingkat lokal. Masjid dengan demikian berperan sebagai motor penggerak masyarakat dalam membangun kehidupan sosial yang sehat dan berkualitas.

Islam menekankan pentingnya keberpihakan terhadap kaum lemah dan marginal. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Ma'un yang mengkritik mereka yang lalai terhadap yatim dan enggan memberi makan orang miskin. Maka, pemberdayaan

sosial berbasis masjid sejatinya merupakan implementasi ajaran Islam yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Jika dikelola dengan baik, masjid dapat menjadi garda terdepan dalam menjawab persoalan sosial masyarakat, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi krisis, seperti bencana alam atau pandemi.

C. Pemberdayaan Ekonomi

Selain peran strategisnya dalam pengelolaan dana umat, masjid juga memiliki peluang besar untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Kegiatan-kegiatan ini dapat mencakup pengelolaan aset masjid secara produktif, seperti pemanfaatan lahan masjid untuk sekolah, tempat pelatihan, toko jamaah, atau kegiatan usaha lainnya yang halal dan tidak mengganggu fungsi utama masjid. Pengelolaan kas dan aset tersebut hendaknya dilakukan secara transparan dan terukur, dengan tetap mempertimbangkan akuntabilitas kepada jamaah dan masyarakat sekitar (Yugo Susanto, Sri Bangun Lestari, 2020).

Salah satu gagasan inovatif dalam pemberdayaan ekonomi berbasis masjid adalah pembentukan pasar komunitas atau pasar berbasis masjid. Dalam konsep ini, dibentuk skema pinjaman dan usaha mikro berbasis kepercayaan yang melibatkan tiga unsur: pengurus masjid, perwakilan masyarakat, dan lembaga otoritas seperti MUI tingkat kecamatan. Skema ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga menciptakan model ekonomi yang adil dan partisipatif, di mana masjid berfungsi sebagai pusat etika dan pengawasan moral dalam transaksi ekonomi umat.

Masjid juga dapat dijadikan tempat konsultasi dan komunikasi dalam menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat. Peran ini penting untuk membina semangat kewirausahaan Islami dan memperkuat jejaring antar pelaku ekonomi mikro. Dalam fungsi ini, masjid dapat menghadirkan ahli ekonomi syariah, konsultan usaha, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pembinaan dan arahan kepada warga, terutama pelaku UMKM.

Salah satu bentuk kelembagaan ekonomi yang sangat relevan untuk dikembangkan melalui masjid adalah Baitut Tamwil, yakni lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang bergerak dalam pengembangan usaha produktif dan investasi. Baitut Tamwil bertujuan membantu pengusaha kecil dan mikro dalam mengakses pembiayaan tanpa riba, mendorong kebiasaan menabung, serta memberikan pelatihan keuangan dasar. Keunggulan dari model ini adalah adanya sistem proteksi sosial melalui dana baitul maal dan rasa kebersamaan antaranggota kelompok. Dengan begitu, risiko kredit macet dapat ditekan melalui tanggung jawab sosial kolektif. Selain itu, sistem ini juga menjamin adanya distribusi manfaat yang lebih merata dari kalangan mampu kepada yang kurang mampu, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.

Selain unit-unit formal seperti Baitut Tamwil, masjid juga dapat menjalankan kegiatan ekonomi sederhana namun berdampak seperti membuka kafetaria atau warung jamaah yang menjual makanan dan minuman halal. Kegiatan ini tidak hanya mendukung ekonomi masjid, tetapi juga mempererat ukhuwah antarjamaah. Di beberapa tempat, masjid bahkan menjadi pusat penyelenggaraan akad nikah dan resepsi pernikahan sederhana, sehingga dapat mengurangi biaya

masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman dalam peristiwa penting tersebut.

Menariknya, beberapa masjid di Indonesia telah bertransformasi menjadi objek wisata religi. Fenomena ini membuka peluang ekonomi lain seperti sektor pariwisata, cinderamata Islami, kuliner halal, hingga jasa pemandu wisata. Ini menunjukkan bahwa masjid dapat menjadi sentra aktivitas yang bukan hanya spiritual, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar.

Untuk mendukung aktivitas ekonomi secara lebih sistematis dan berkelanjutan, masjid juga dapat membentuk koperasi jamaah. Koperasi masjid ini berfungsi sebagai organisasi bisnis yang tidak semata mencari keuntungan, tetapi juga melayani kebutuhan anggota dengan prinsip syariah. Koperasi berbasis masjid bisa menjadi wadah yang kuat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat, karena menggabungkan nilai gotong royong, keadilan, dan transparansi.

Dengan berbagai bentuk dan potensi kegiatan tersebut, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang sistemik. Masjid bukan hanya sebagai tempat sujud, tetapi juga sebagai motor penggerak perbaikan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pengurus masjid, masyarakat, pemerintah, dan lembaga ekonomi syariah sangat dibutuhkan agar potensi ekonomi masjid dapat dikelola secara maksimal dan memberikan dampak nyata bagi kemandirian umat.

BAB 5

STUDI KASUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS MASJID

A. Profil Masjid Merah (Masjid Moekhlas Sidiq)



Gambar 1 Masjid Moekhlas Sidiq

Masjid Moekhlas Sidik yang mana dikenal dengan sebutan Masjid Merah yang terletak di Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Masjid ini dikenal luas dengan sebutan “Masjid Merah” karena keunikan arsitekturnya yang didominasi oleh warna merah pada bagian eksterior bangunan. Keunikan warna tersebut tidak hanya menjadi daya tarik visual, tetapi juga menjadi identitas khas masjid ini di tengah masyarakat. Masjid Moekhlas Sidik diresmikan pada hari Kamis, 19 September 2019 M yang bertepatan dengan 19 Muharram 1441 H, sebagai simbol hadirnya pusat ibadah dan aktivitas sosial baru di kawasan Duren Sewu.

Masjid ini dibangun di atas tanah wakaf dan dikelola oleh para tokoh masyarakat serta pengurus yang memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan fungsi masjid secara menyeluruh, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan umat. Fasilitas masjid meliputi ruang utama untuk shalat, tempat wudhu yang bersih, halaman luas, serta sarana pendukung lainnya untuk kegiatan keagamaan dan sosial. Kepengurusan masjid terdiri dari takmir yang membidangi aspek keagamaan, sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan.

Masjid Moekhlas Sidik, yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Masjid Merah, berdiri atas dasar niat tulus dan tekad kuat dari seorang tokoh bangsa, Laksamana Madya (Purn) TNI Moekhlas Sidik. Beliau merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang pernah menduduki berbagai jabatan strategis, di antaranya Panglima Armada Barat (Pangarmabar), Panglima Armada Timur (Pangarmatim), Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal), dan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (Dansesko TNI). Di tengah kesibukannya sebagai prajurit dan pemimpin militer, Moekhlas Sidik tetap menyimpan satu cita-cita sederhana namun berarti: membangun sebuah masjid megah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan masyarakat.

Proses pembangunan masjid ini terletak di Desa Duren Sewu Pancaan Pasuruan Jawa Timur, yang mana pembangunannya dilakukan dengan penuh kesungguhan dan dedikasi. Ia mengawasi langsung berbagai tahap pembangunan, dari perencanaan desain, pemilihan warna, hingga aspek arsitektur yang diinginkan. Pembangunan masjid tidak hanya

dimaksudkan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai warisan spiritual dan sosial bagi masyarakat luas.

Masjid ini diresmikan pada hari Kamis, 19 September 2019, bertepatan dengan 19 Muharram 1441 Hijriyah, sebagai momen penting yang menandai dibukanya rumah ibadah tersebut untuk masyarakat umum. Nama Masjid Moekhlis Sidik secara resmi disematkan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada beliau sebagai pendiri dan dermawan utama. Namun dalam praktiknya, masyarakat sekitar lebih akrab menyebutnya sebagai Masjid Merah karena warna dominan merah yang menghiasi seluruh bagian luar bangunan masjid.

Dari sisi arsitektur, Masjid Merah memiliki desain yang sangat khas dan tidak biasa. Tidak seperti masjid pada umumnya yang memiliki menara, masjid ini dibangun tanpa menara, namun tetap menunjukkan kemegahan melalui posisi bangunan yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya. Bagian dalam masjid dirancang berbentuk segi delapan, dengan delapan sisi menjorok keluar. Setiap sisi memiliki jendela dan pintu berukuran tinggi yang hampir menyentuh langit-langit, dan semuanya dibiarkan terbuka tanpa daun pintu, menghadirkan kesan luas, terang, dan menyatu dengan alam.

Lingkungan di sekitar masjid yang masih asri, dikelilingi hamparan persawahan dan jauh dari hiruk-pikuk kota, menjadikan suasana masjid begitu tenang dan damai. Hal ini menambah nilai spiritualitas sekaligus estetika dari keberadaan masjid. Halaman masjid yang cukup luas juga memungkinkan untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, termasuk menjadi tempat favorit masyarakat untuk berfoto karena arsitekturnya yang instagramable dan artistik. Sejak

diresmikan, Masjid Moekhlas Sidik tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga telah menjadi pusat aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat sekitar.

Adapun Visi dan Misi Masjid Merah di Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Yakni Visi: Pengembangan dakwah dan syiar Islam, pendidikan, sosial budaya, serta manajemen yang handal, dengan tujuan menciptakan masyarakat berakhlak mulia sesuai ajaran Islam. Dan Misi Masjid Merah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan ibadah, dakwah, dan syiar Islam.
2. Penyelenggaraan pendidikan Islam.
3. Penyelenggaraan sosial budaya Islam.
4. Mewujudkan manajemen masjid yang handal.
5. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia.

B. Peran Masyarakat dan Pengurus Masjid

Keberhasilan program pemberdayaan berbasis masjid sangat ditentukan oleh sinergi antara pengurus masjid dan partisipasi aktif masyarakat. Masjid bukanlah institusi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang tumbuh bersama jamaahnya. Oleh karena itu, pengurus masjid tidak hanya bertugas mengurus pelaksanaan ibadah semata, tetapi juga menjadi penggerak sosial, fasilitator pembangunan masyarakat, serta agen perubahan yang menjembatani kebutuhan spiritual dan kebutuhan hidup umat secara menyeluruh.

Pengurus masjid memiliki peran sentral dalam merancang, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan program-program pemberdayaan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Mereka harus memiliki visi pemberdayaan

yang kuat dan mampu mengembangkan manajemen masjid yang profesional, transparan, dan akuntabel. Tugas pengurus tidak hanya administratif, tetapi juga strategis, seperti menyusun perencanaan jangka panjang, membangun kemitraan dengan lembaga eksternal (seperti BAZNAS, LAZ, dinas sosial, atau lembaga pendidikan), serta melakukan evaluasi atas dampak program yang dijalankan. Oleh karena itu, kapasitas dan kompetensi pengurus masjid perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan manajemen masjid, pelatihan keuangan syariah, dan penguatan literasi sosial.

Sementara itu, masyarakat berperan sebagai subjek utama dari pemberdayaan. Mereka tidak hanya sebagai penerima manfaat (beneficiaries), tetapi juga sebagai pelaksana, pengawas, bahkan penyumbang ide dan sumber daya. Partisipasi masyarakat bisa berupa keterlibatan dalam kegiatan gotong royong, menjadi relawan dalam kegiatan sosial, menyumbangkan dana atau waktu, atau aktif dalam kelompok majelis taklim, koperasi jamaah, atau remaja masjid. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam program-program masjid, maka akan semakin kuat rasa memiliki terhadap masjid, dan program-program tersebut pun akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Peran sinergis ini sejalan dengan konsep pemberdayaan itu sendiri yang menekankan pada pelibatan aktif masyarakat dalam proses perubahan. Pengurus masjid yang hanya bekerja sendiri tanpa melibatkan masyarakat akan kehilangan daya dukung, sementara masyarakat yang tidak diberdayakan hanya akan menjadi objek pasif. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik antara pengurus dan jamaah, dialog

terbuka, dan transparansi dalam pengelolaan masjid agar tercipta suasana kepercayaan dan kolaborasi yang sehat.

Dalam Islam, prinsip musyawarah (syura) dan tanggung jawab kolektif sangat ditekankan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat diterapkan dalam pengelolaan masjid melalui forum-forum jamaah yang memungkinkan aspirasi dan kritik dari warga terdengar dan ditindaklanjuti. Rasulullah SAW sendiri memberikan teladan dengan menjadikan masjid sebagai tempat diskusi dan perencanaan kehidupan umat. Oleh karena itu, masjid idealnya menjadi ruang demokrasi partisipatif di mana pengurus dan masyarakat bersama-sama menyusun langkah-langkah terbaik untuk kebaikan umat. Selain menjalankan fungsi-fungsi manajerial dan spiritual, pengurus masjid juga diharapkan mampu menjadi komunikator yang efektif antara masjid dan lingkungan sekitar. Dalam konteks pemberdayaan, pengurus masjid harus proaktif memetakan potensi dan permasalahan masyarakat sekitar masjid. Misalnya, jika mayoritas masyarakat sekitar masjid memiliki keterampilan kerajinan, maka pengurus bisa menginisiasi pelatihan usaha dan membuka wadah pemasaran produk. Inilah bentuk konkret dari peran fasilitator yang tidak hanya menyampaikan dakwah lisan, tetapi juga mewujudkan dakwah sosial dalam praktik nyata.

Di sisi lain, masyarakat juga memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas fungsi masjid. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi pengguna fasilitas masjid secara pasif, tetapi seharusnya terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program yang dijalankan. Bentuk partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam musyawarah jamaah,

penggalangan dana, menjadi pengajar sukarela di TPA atau majelis taklim, serta mendukung kegiatan sosial-ekonomi yang berbasis masjid. Ketika masyarakat merasa memiliki terhadap masjid, maka akan tumbuh rasa tanggung jawab kolektif dalam memelihara serta mengembangkan peran masjid dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungan yang harmonis antara pengurus dan masyarakat ini harus dibangun di atas asas transparansi, kepercayaan, dan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Salah satu strategi untuk memperkuat hubungan ini adalah melalui publikasi rutin laporan kegiatan dan keuangan masjid secara terbuka, serta menyediakan wadah aspirasi jamaah yang inklusif. Pengurus masjid yang terbuka terhadap masukan akan lebih mampu menyesuaikan arah kegiatan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Sinergi antara masyarakat dan pengurus masjid menjadi kunci utama dalam menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan yang efektif. Keduanya saling melengkapi: pengurus sebagai pengarah dan pengelola, sementara masyarakat sebagai penggerak dan pelaksana. Dalam jangka panjang, kolaborasi ini akan melahirkan ekosistem masjid yang tidak hanya hidup secara spiritual, tetapi juga mandiri secara sosial dan ekonomi.

C. Hasil Dan Dampak Pemberdayaan

Program pemberdayaan berbasis masjid yang dijalankan secara terstruktur dan berkelanjutan mampu menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Hasil dari pemberdayaan ini tidak hanya terlihat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan ekonomi atau keberhasilan program

sosial, tetapi juga dalam perubahan cara pandang dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap peran masjid sebagai pusat pengembangan umat. Masjid yang aktif dalam program pemberdayaan mampu menumbuhkan semangat kemandirian, kepedulian sosial, serta peningkatan kualitas hidup jamaahnya.

Salah satu hasil konkret dari pemberdayaan adalah terbentuknya masyarakat yang lebih produktif dan partisipatif. Program-program ekonomi seperti koperasi masjid, pelatihan usaha, atau unit Baitut Tamwil mendorong masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, untuk berani berwirausaha dan membangun ketahanan ekonomi keluarga. Di sisi lain, kegiatan pendidikan berbasis masjid, seperti TPA, majelis taklim, dan pelatihan literasi, menghasilkan generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang kuat tetapi juga keterampilan sosial yang baik. Dampak jangka panjang dari hal ini adalah tumbuhnya masyarakat yang cerdas, terdidik, dan mandiri.

Dalam aspek sosial, pemberdayaan yang dilakukan masjid mampu memperkuat kohesi dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Kegiatan seperti santunan, layanan kesehatan, dan musyawarah warga menciptakan ruang interaksi yang mempererat ukhuwah dan meminimalisasi potensi konflik. Bahkan di masa-masa sulit, seperti saat terjadi bencana alam atau pandemi, masjid yang aktif dalam pemberdayaan terbukti menjadi titik distribusi bantuan dan sumber kekuatan kolektif masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masjid memiliki kapasitas sebagai garda terdepan dalam ketahanan sosial komunitas.

Selain hasil yang bersifat langsung, pemberdayaan juga berdampak pada transformasi budaya masyarakat. Masjid yang

hidup dengan kegiatan pemberdayaan akan membentuk budaya kolektif yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Budaya inilah yang menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat madani (civil society) yang berbasis spiritualitas dan kepedulian.

Tidak kalah penting, pemberdayaan berbasis masjid juga berdampak pada peningkatan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap masjid. Ketika masyarakat melihat bahwa masjid hadir sebagai solusi atas persoalan mereka, baik ekonomi, sosial, maupun spiritual, maka akan tumbuh rasa memiliki dan kebanggaan terhadap masjid. Masjid tidak lagi dipandang sekadar tempat shalat, tetapi sebagai institusi umat yang relevan dan solutif. Ini menjadi modal sosial yang sangat kuat untuk mempertahankan keberlangsungan dan kebermanfaatan masjid di tengah dinamika zaman.

Namun, untuk memastikan dampak tersebut berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi dan pengukuran hasil secara berkala. Kegiatan pemberdayaan harus disertai dengan indikator yang jelas agar capaian program dapat dianalisis, ditingkatkan, dan direplikasi di tempat lain. Pendokumentasian praktik-praktik baik juga penting untuk menjadi rujukan bagi masjid lain yang ingin mengembangkan program serupa.

Selain berdampak pada individu dan komunitas, program pemberdayaan berbasis masjid juga memberikan kontribusi penting dalam memperkuat posisi strategis masjid di tengah dinamika pembangunan masyarakat. Ketika masjid berhasil menunjukkan perannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial seperti pengangguran, buta huruf, kemiskinan, dan keterbelakangan ekonomi maka keberadaan

masjid akan semakin diakui tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh institusi pemerintah dan lembaga sosial lainnya. Masjid pun tidak lagi sekadar dilihat sebagai tempat ibadah ritual, melainkan sebagai mitra pembangunan yang konkret, aktif, dan produktif.

Lebih jauh lagi, hasil pemberdayaan berbasis masjid sering kali memunculkan aktor-aktor baru dalam masyarakat, seperti tokoh lokal, kader remaja masjid, serta pelaku usaha kecil yang muncul sebagai buah dari proses pembinaan dan pelatihan yang dilakukan di lingkungan masjid. Kehadiran individu-individu yang berdaya ini menjadi inspirasi dan motor penggerak dalam komunitasnya. Mereka bukan hanya hasil dari proses pemberdayaan, tetapi juga menjadi agen yang menyebarkan nilai-nilai produktivitas, kemandirian, dan kepedulian kepada lingkungan sekitar.

Dampak lain yang penting untuk dicatat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dana sosial berbasis syariah. Dengan terbiasanya masyarakat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga masjid, maka akan terbentuk sistem ekonomi umat yang tangguh dan berkeadilan. Ini merupakan bentuk implementasi nyata dari semangat QS. At-Taubah: 103, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” hal ini jika diterapkan secara konsisten, dapat menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang inklusif dan merata.

Tak kalah penting, keberhasilan pemberdayaan juga bisa memunculkan inovasi sosial. Banyak masjid kini memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi programnya, seperti dalam pencatatan keuangan, penyaluran

dana bantuan, hingga pelaksanaan pelatihan daring. Inovasi-inovasi ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan masjid, tetapi juga meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan masjid yang modern dan adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pemberdayaan bukan hanya dirasakan secara lokal, tetapi dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih luas dan bersifat sistemik.

Menurut Totok Mardikanto (2012: 17), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan dapat diukur dari seberapa besar masyarakat mampu mengenali potensinya, memecahkan masalah secara mandiri, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan sosial, ekonomi, dan spiritual. Dalam konteks masjid, hal ini terlihat dari makin banyaknya warga yang ikut terlibat dalam kegiatan produktif, pelatihan keterampilan, hingga program kemandirian ekonomi berbasis komunitas masjid.

Senada dengan itu, Soetomo (2006: 94) menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan harus dilihat dari peningkatan kapasitas masyarakat, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap hidup. Misalnya, masyarakat yang awalnya bergantung pada bantuan, perlahan tumbuh menjadi masyarakat yang berinisiatif membuka usaha mandiri setelah mengikuti pelatihan wirausaha di masjid. Di sinilah peran masjid menjadi sangat vital, karena mampu membangun kepercayaan diri masyarakat dan menciptakan lingkungan sosial yang suportif.

Hasil pemberdayaan juga tampak dalam bentuk hubungan sosial yang lebih harmonis. Menurut Robert D.

Putnam, dalam teorinya tentang social capital, keberhasilan suatu komunitas sangat dipengaruhi oleh jaringan sosial yang kuat, rasa saling percaya, dan norma-norma kolektif yang mengikat. Masjid sebagai institusi keagamaan memiliki kapasitas luar biasa untuk membentuk modal sosial tersebut, terutama melalui kegiatan jamaah, musyawarah warga, hingga kegiatan gotong royong dan solidaritas sesama.

Selain itu, pemberdayaan juga menghasilkan dampak jangka panjang berupa kemandirian institusional masjid. Dengan adanya sistem pengelolaan yang profesional dan keterlibatan masyarakat yang tinggi, masjid tidak lagi bergantung pada bantuan eksternal, tetapi mampu menjalankan program-programnya secara berkelanjutan.

BAB 6

TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASJID

A. Tantangan Dalam Pemberdayaan Berbasis Masjid

Meskipun masjid memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi baik oleh pengurus masjid maupun masyarakat dalam mewujudkan masjid sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Tantangan ini bersifat struktural, kultural, maupun teknis, dan jika tidak ditangani dengan tepat, dapat menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan secara menyeluruh.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kapasitas manajerial pengurus masjid. Banyak pengurus masjid yang belum memiliki keterampilan dalam bidang manajemen keuangan, administrasi, atau pengembangan program sosial. Hal ini menyebabkan program pemberdayaan sering kali tidak terarah, tidak berkelanjutan, atau bahkan tidak terealisasi. Menurut Soetomo (2006: 87), kelembagaan masyarakat seperti masjid memerlukan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu menjalankan peran sosialnya secara efektif dan profesional.

Tantangan lain adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat. Di beberapa tempat, masjid masih dianggap hanya sebagai tempat ibadah ritual, bukan sebagai pusat kegiatan komunitas. Akibatnya, masyarakat enggan terlibat dalam program-program pemberdayaan yang dirancang pengurus masjid. Hal ini diperparah dengan minimnya forum komunikasi

antara pengurus dan jamaah, sehingga aspirasi masyarakat tidak terserap dan kegiatan masjid menjadi kurang relevan dengan kebutuhan riil warga sekitar.

Dari sisi finansial, masjid juga menghadapi tantangan dalam hal penggalangan dan pengelolaan dana. Tidak semua masjid memiliki sistem keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kadang menjadi hambatan. Padahal, keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada kepercayaan jamaah terhadap pengurus, terutama dalam penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Selain itu, belum banyak masjid yang mampu memanfaatkan dana wakaf secara produktif untuk kegiatan ekonomi umat.

Secara kultural, tantangan yang cukup besar adalah adanya resistensi terhadap perubahan. Gagasan pemberdayaan yang bersifat progresif kadang ditolak karena dianggap “keluar” dari fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah. Sebagian masyarakat masih memegang pandangan konservatif bahwa aktivitas ekonomi atau sosial di lingkungan masjid dapat mengganggu kekhusyukan ibadah. Padahal, Islam sendiri memberikan ruang luas untuk kegiatan muamalah yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman, selama tetap menjaga adab dan kesucian masjid.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung. Banyak masjid yang tidak memiliki fasilitas memadai untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan, pengajian, atau layanan sosial. Kurangnya ruang serbaguna, peralatan multimedia, atau fasilitas sanitasi yang layak sering kali menjadi hambatan teknis dalam penyelenggaraan kegiatan

pemberdayaan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan minat dan partisipasi masyarakat.

Tantangan terakhir yang juga penting adalah kurangnya sinergi dengan lembaga eksternal. Masjid sering kali bekerja sendiri tanpa membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga amil zakat, lembaga pendidikan, atau komunitas profesional. Padahal, sinergi ini sangat penting untuk memperkuat sumber daya, memperluas cakupan program, dan memperdalam dampak pemberdayaan yang dilakukan. Tanpa jaringan yang kuat, program masjid akan cenderung bersifat lokal, jangka pendek, dan tidak sistemik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Mardikanto (2012: 41), pemberdayaan masyarakat yang efektif mensyaratkan adanya kemampuan organisasi lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan, merancang solusi, dan menjalankan program secara mandiri. Namun dalam konteks masjid, sering kali muncul kendala dalam bentuk lemahnya perencanaan partisipatif. Banyak kegiatan yang dijalankan tanpa analisis kebutuhan yang tepat atau tanpa melibatkan jamaah secara luas dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan program pemberdayaan kerap bersifat seremonial dan tidak berdampak signifikan. Keterbatasan dalam perencanaan ini mencerminkan bahwa masjid masih membutuhkan pendampingan dalam aspek metodologi pengembangan masyarakat berbasis Islam.

Menurut Soedijarto (2004: 132), rendahnya mutu lembaga sosial keagamaan dalam menjalankan perannya kerap disebabkan oleh lemahnya budaya organisasi dan kurangnya evaluasi program secara periodik. Hal ini juga berlaku di banyak masjid yang belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi kegiatan secara sistematis. Ketika program tidak

dievaluasi secara berkala, maka kelemahan tidak teridentifikasi, dan peluang peningkatan kualitas tidak dapat dimanfaatkan. Padahal, evaluasi adalah langkah penting untuk memastikan kegiatan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dampak nyata.

Selain itu, Fakih (2002: 18) dalam bukunya "Rethinking Empowerment" mengingatkan bahwa pemberdayaan sejati adalah proses transformasi sosial yang menggeser relasi kuasa dari elite ke masyarakat luas. Dalam konteks ini, tantangan pemberdayaan di masjid juga bersumber dari struktur internal yang kadang terlalu terpusat pada tokoh atau figur tertentu. Jika kepemimpinan dalam masjid bersifat dominatif dan tidak memberi ruang partisipasi luas, maka cita-cita pemberdayaan akan sulit terwujud. Untuk itu, kepemimpinan masjid perlu berbasis kolegial dan demokratis agar proses pemberdayaan benar-benar menumbuhkan kesadaran dan kekuatan kolektif masyarakat.

Menurut Hasan (2015: 213) dalam studi tentang penguatan peran masjid di era modern menjelaskan bahwa salah satu tantangan paling nyata adalah bagaimana menjadikan masjid tetap relevan bagi generasi muda. Banyak program masjid yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan dan gaya hidup remaja dan pemuda Muslim, sehingga terjadi jarak generasional antara pengurus dan calon kader masa depan. Jika tidak segera diatasi, hal ini akan menimbulkan kekosongan regenerasi dalam pengelolaan masjid dan mengancam keberlanjutan program-program pemberdayaan.

Selain tantangan internal seperti kelemahan manajemen dan rendahnya partisipasi jamaah, pemberdayaan berbasis masjid juga menghadapi tantangan eksternal yang tidak kalah

kompleks. Salah satunya adalah kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah terhadap masjid sebagai institusi pemberdayaan. Dalam banyak kasus, program-program pembangunan pemerintah lebih terfokus pada pendekatan struktural dan teknokratik, sehingga masjid tidak dilibatkan secara aktif sebagai mitra strategis. Padahal, jika dimaksimalkan, masjid dapat berperan sebagai ujung tombak dalam penyampaian program-program sosial pemerintah, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan berbasis komunitas.

Tantangan lain yang kerap dihadapi adalah fragmentasi dalam pengelolaan kegiatan masjid. Di beberapa wilayah, terjadi tumpang tindih peran antar-lembaga keagamaan, pengurus takmir, remaja masjid, serta lembaga pendidikan yang bernaung di bawah masjid. Jika tidak ada koordinasi dan sinergi yang kuat, maka kegiatan-kegiatan tersebut menjadi terpisah-pisah, tidak terintegrasi, bahkan dapat memicu konflik internal. Untuk itu, diperlukan struktur organisasi yang solid dan komunikasi internal yang terbuka agar seluruh unsur dalam masjid bergerak dalam satu visi pemberdayaan yang sama.

Di era digital, muncul pula tantangan baru dalam bentuk ketimpangan literasi digital di kalangan pengurus dan jamaah. Sementara sebagian masjid telah mulai memanfaatkan teknologi digital untuk edukasi, dakwah online, dan penggalangan dana, sebagian lainnya masih kesulitan dalam menggunakan media sosial atau aplikasi manajemen masjid. Ketimpangan ini menyebabkan jurang antara masjid yang adaptif dengan zaman dan masjid yang stagnan. Padahal, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi jembatan untuk

menjangkau generasi muda dan memperluas cakupan dakwah serta program sosial secara lebih efektif.

Tak kalah penting adalah tantangan dalam hal ketahanan ideologis masjid dari paham-paham ekstrem atau eksklusif. Masjid sebagai ruang publik umat Islam sangat rentan menjadi sasaran penyebaran ideologi yang tidak sejalan dengan prinsip moderasi Islam (wasathiyah). Jika pengurus tidak memiliki pemahaman keislaman yang kuat dan terbuka, maka pemberdayaan yang semestinya inklusif dan membangun kerukunan, justru dapat berubah menjadi alat segmentasi sosial. Oleh sebab itu, penting bagi masjid untuk memperkuat wawasan keislaman yang rahmatan lil ‘alamin dan menjaga agar seluruh aktivitas pemberdayaan tidak melenceng dari nilai-nilai persatuan dan kemanusiaan.

Selain itu, tantangan dalam hal sumber daya manusia (SDM) yang tidak merata juga menjadi hambatan serius. Tidak semua masjid memiliki pengurus yang berlatar belakang pendidikan tinggi atau pengalaman dalam mengelola organisasi. Banyak pengurus yang bekerja secara sukarela dan belum mendapatkan pelatihan dalam bidang manajemen sosial, kewirausahaan, atau komunikasi publik. Akibatnya, inovasi pemberdayaan menjadi terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya program peningkatan kapasitas (capacity building) yang berkelanjutan bagi para pengurus masjid melalui pelatihan, workshop, dan pembinaan rutin.

Tantangan-tantangan ini seharusnya tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi cermin evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemberdayaan berbasis masjid. Dengan mengenali hambatan secara jujur, maka akan lebih mudah menyusun strategi penyelesaian yang realistis dan

kontekstual. Pendekatan kolaboratif, adaptif terhadap perubahan zaman, serta berpijak pada prinsip keadilan sosial Islam menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut agar masjid benar-benar dapat menjadi pusat pemberdayaan yang hidup dan berkelanjutan.

B. Strategi Dalam Pemberdayaaan Berbasis Masjid

Untuk mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, diperlukan strategi yang sistematis, kontekstual, dan berkelanjutan. Strategi pemberdayaan berbasis masjid tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga ideologis dan kultural, yang mencakup pembinaan kesadaran umat serta penanaman nilai-nilai Islam dalam aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Langkah strategis ini perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sekitar masjid, sumber daya manusia yang tersedia, serta dukungan kelembagaan dari internal dan eksternal.

Langkah awal yang penting adalah penguatan kelembagaan masjid. Pengurus masjid sebagai motor penggerak utama harus dibekali dengan kemampuan manajerial, leadership, serta pemahaman konsep pemberdayaan. Pelatihan rutin mengenai manajemen organisasi, pengelolaan keuangan syariah, dan komunikasi publik perlu dilakukan agar pengelolaan masjid lebih profesional. Strategi ini bertujuan agar masjid tidak hanya berjalan sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai institusi sosial yang terpercaya. Seperti yang disampaikan oleh Mardikanto (2012: 23), kelembagaan lokal yang kuat menjadi tulang punggung utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, strategi yang tak kalah penting adalah peningkatan partisipasi aktif masyarakat. Masjid harus menjadi ruang publik yang inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat merasa memiliki dan terlibat. Pendekatan ini bisa dilakukan melalui forum musyawarah jamaah, kegiatan sosial bersama, hingga pembentukan unit-unit kerja seperti remaja masjid, koperasi jamaah, atau majelis taklim ibu-ibu. Semakin banyak masyarakat terlibat dalam aktivitas masjid, maka semakin besar pula kekuatan kolektif yang dapat dihasilkan. Menurut Soetomo (2006: 88), partisipasi aktif adalah inti dari pemberdayaan karena menjadikan masyarakat sebagai pelaku, bukan hanya penerima manfaat.

Strategi selanjutnya adalah sinergi dan kolaborasi antar-lembaga. Masjid tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus membangun jejaring dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga zakat, kampus, LSM, dan sektor swasta. Kolaborasi ini bisa dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan wirausaha, pengelolaan zakat produktif, atau program pendidikan gratis bagi anak dari keluarga dhuafa. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan masjid memperoleh akses sumber daya yang lebih besar dan memperluas dampak program yang dijalankan.

Inovasi program pemberdayaan juga menjadi strategi penting di era digital. Masjid perlu mengembangkan layanan berbasis teknologi, seperti aplikasi keuangan masjid, sistem donasi digital, platform edukasi daring, dan pelatihan soft skill online. Ini penting untuk menjangkau generasi muda dan kelompok masyarakat yang lebih akrab dengan dunia digital. Menurut Hasan (2015), modernisasi pengelolaan masjid akan

memperluas jangkauan dakwah serta meningkatkan efisiensi dan transparansi program pemberdayaan.

Tak kalah penting, masjid perlu menjalankan strategi berbasis kebutuhan lokal (*need-based approach*). Artinya, setiap program harus dirancang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat sekitar masjid, bukan berdasarkan asumsi dari atas. Misalnya, jika di sekitar masjid banyak ibu rumah tangga, maka program pemberdayaan bisa berupa pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, atau ekonomi kreatif. Sementara di daerah urban, bisa dikembangkan unit usaha startup berbasis syariah atau pelatihan digital marketing.

Strategi penguatan nilai-nilai spiritual dan akhlak sebagai fondasi pemberdayaan. Seluruh program sosial, ekonomi, atau pendidikan harus tetap berakar pada semangat tauhid, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya menciptakan masyarakat mandiri secara ekonomi, tetapi juga memiliki integritas moral dan kepedulian sosial yang tinggi.

Menurut Raharjo (2013: 75), pemberdayaan berbasis masjid akan berhasil bila dirancang melalui pendekatan yang holistik, yaitu mencakup dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dalam satu sistem kegiatan masjid yang saling mendukung. Misalnya, kegiatan majelis taklim bukan hanya tempat pengajian, tetapi juga dapat menjadi ruang diskusi sosial, pembelajaran ekonomi rumah tangga, hingga penguatan peran perempuan dalam masyarakat. Integrasi antarprogram ini membuat pemberdayaan lebih efektif karena membangun nilai dan kapasitas secara bersamaan.

Dalam konteks ekonomi, Syamsuddin (2019: 132) menyebutkan bahwa strategi pemberdayaan di masjid yang berbasis pada potensi lokal memiliki keberhasilan lebih tinggi. Ia mencontohkan masjid di Yogyakarta yang sukses menjalankan koperasi simpan pinjam berbasis syariah dan unit usaha berbasis wakaf produktif. Strategi ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar masjid sekaligus membangun sistem ekonomi umat yang berkeadilan. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan masjid membaca kebutuhan dan potensi jamaah, lalu mengemasnya dalam bentuk kegiatan ekonomi yang terarah dan bermakna.

Menurut Fadli (2021: 89) menekankan bahwa strategi pemberdayaan yang berbasis masjid harus pula memperhatikan prinsip inklusivitas. Masjid tidak boleh menjadi tempat eksklusif untuk kelompok tertentu, tetapi harus menjadi ruang terbuka yang mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi, usia, bahkan pilihan politik. Masjid yang mampu menjaga netralitasnya akan memiliki legitimasi sosial yang kuat untuk menjalankan berbagai bentuk pemberdayaan. Oleh karena itu, salah satu strategi penting adalah menjaga masjid sebagai ruang netral dan inklusif, agar kepercayaan jamaah tetap terpelihara.

Sebagaimana diungkapkan oleh Chambers (1993) dalam konsep *people-centered development*, pemberdayaan harus mendorong keberdayaan warga secara aktif. Masjid yang mampu menjadi wadah aspirasi dan partisipasi aktif warga dapat menjadi motor perubahan sosial. Hal ini bisa dilakukan melalui pembentukan forum musyawarah jamaah, pelatihan kader dakwah masyarakat, hingga pelibatan pemuda dalam program-program digitalisasi masjid. Strategi seperti ini

menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, sejalan dengan tujuan utama pemberdayaan itu sendiri.

Strategi pemberdayaan masjid juga perlu diarahkan pada penguatan fungsi edukatif masjid sebagai pusat literasi keagamaan dan sosial. Banyak masyarakat yang masih belum memiliki akses pengetahuan keislaman yang mencerahkan, kritis, dan kontekstual. Oleh karena itu, masjid perlu menyelenggarakan pendidikan nonformal yang berorientasi pada pembentukan karakter, literasi keagamaan, serta kesadaran sosial. Kegiatan seperti pelatihan pengelolaan zakat, literasi wakaf produktif, pendidikan keluarga Islami, hingga seminar kewirausahaan syariah bisa menjadi bagian integral dari strategi pemberdayaan. Menurut Zamroni (2001), masjid yang mengembangkan fungsi edukatifnya secara progresif akan melahirkan masyarakat yang bukan hanya saleh secara individual, tetapi juga kritis, mandiri, dan berdaya dalam menghadapi tantangan zaman.

Selain itu, penting pula untuk merancang strategi berbasis pemetaan sosial (social mapping). Setiap masjid memiliki karakter komunitas yang berbeda-beda baik dari sisi demografi, ekonomi, budaya, maupun geografis. Oleh sebab itu, sebelum merancang program pemberdayaan, takmir atau tim penggerak masjid perlu melakukan identifikasi mendalam terhadap kondisi riil jamaah. Strategi ini memungkinkan program pemberdayaan menjadi tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Sebagaimana disampaikan oleh Edi Suharto (2009: 56), pendekatan berbasis kebutuhan lokal dan partisipatif adalah prinsip utama dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan, termasuk ketika diterapkan dalam konteks masjid.

Strategi lain yang tidak boleh diabaikan adalah penguatan narasi masjid sebagai pusat keadilan sosial. Dalam sejarah Islam, masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat peradaban, pengadilan, pendidikan, bahkan diplomasi. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan di masjid juga harus membangkitkan kembali semangat keadilan sosial Islam ('adl dan ihsan) yang inklusif, humanis, dan membela kaum mustad'afin (lemah). Penguatan narasi ini bisa dimulai dari khutbah Jumat, pengajian, hingga kampanye sosial melalui media digital masjid. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, masjid di Madinah menjadi pusat integrasi antara spiritualitas, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat.

Tak penting, masjid juga harus menyusun perencanaan jangka panjang (strategic planning) agar program pemberdayaan tidak hanya bersifat reaktif atau musiman. Dalam hal ini, masjid dapat menyusun Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat (RIPM) berbasis masjid yang mencakup visi, misi, target capaian, indikator keberhasilan, dan pembagian peran antar pihak. Dengan perencanaan yang terukur, masjid dapat menjadi lembaga yang visioner dan adaptif terhadap perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsiyah, Ribawanto, H., & Sumartono. (2009). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoharjo). *Wacana Journal of Social Studies*, 12(2), 53–66.
- Endah, K., Galuh, U., & Lokal, P. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi*. 6, 135–143.
- Galuh. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Kabupaten Pangandaran*. 5(4), 267–277.
- Jawahir, M., & Uyuni, B. (2019). Mosque-Based Community Empowerment. *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1), 36–43. <https://doi.org/10.34005/spektra.v1i1.1140>
- Karim, H. A. (2020). *Revitalisasi Manajemen Pengelolaan Peran Dan Fungsi Masjid Sebagai Lembaga Keislaman*. 5(2), 139–150.
- Kirana, D. A. (2024). *Partisipasi Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi di Indonesia : Tinjauan Analitis Terhadap Peran Rakyat dalam Pembentukan Kebijakan Publik*. 2(3), 285–299.
- Muhtadi. (2018). *Mosque Based Community Empowerment And*. 41(95), 167–180.
- Muslim, A. (2007). Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, VIII(2), 89–103. <https://doi.org/10.1177/0734282911435461>
- Nezha, R. (2014). *Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi*

Dampak Krisis (PDM.DKE)Ekonomi Kota Surakarta (Studi Tentang Program Dana Bergulir Di Kecamatan Laweyan). 1–203.

- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Layanan Sosial Dan Pendidikan Masjid Besar Al-Amin Kecamatan Manggala Makassar) Skripsi.* 1–27.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 88.
<https://doi.org/10.2307/257670>.Poerwanto.
- Nurjamilah, C. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi saw. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 93–119.
<https://doi.org/10.21580/jish.11.1375>
- Pratama, R. (2016). Peran Kepemimpinan Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(2), 1–14.
<https://www.neliti.com/id/publications/189022/peran-kepemimpinan-lurah-dalam-pemberdayaan-masyarakat-di-kelurahan-maharatu-kec#cite>
- Priyadi, U. (1997). Pelaksanaan Program Inpres Desa Tertinggal dalam Perspektif Pembangunan Perdesaan. *JEP:Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(3), 290–300.
- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 82–98.
<https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.2396>
- Ristiana, R., & Yusuf, A. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi*

Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep. 4(1), 88–101.

Ruslan, I. (2012). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Pontianak. *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 16–25.

Shukri, A., & Hamid, A. (2015). *Konseptualisasi Pembangunan Komuniti melalui Analisis Konsep Struktur Sosial , Teori Modal Sosial dan Perspektif Realisme Kritis*. 18, 21–40.

Sidik, F. (2015). *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa.* 19(2), 115–131.

Sukmawati, H. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Dunia Pesantren. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(1), 71–77.

Suryawati, E. (2021). Pemberdayaan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam. *Al-Rabwah*, 15(02), 60–69.
<https://doi.org/10.55799/jalr.v15i02.124>

Ummah, M. S. (2019). Bahan Pangan Lingkungan Kosmetik Kimia Edukasi. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Utami, S. M., Sejarah, J., Indonesia, J. T., & Artikel, I. (2013). *Forum ilmu sosial.* 40(1).

- Wadu, L. B., Gultom, A. F., Pantus, F., & Malang, U. K. (2020). *Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi : Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan*. 10(November), 80–88.
- Wati, R. (2016). *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. 1–23.
- Yugo Susanto, Sri Bangun Lestari, E. P. (2020). Pemberdayaan Masjid. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 1(2), 1–10.
- Zubaidah, S., Indah, V. F., & Laili, R. (2024). *PARTISIPASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI PEDAMARAN TIMUR , OGAN KOMERING*. 7(September), 69–86.